



RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025**



SamsatApps
Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724, Fax. 0370-641151 Mataram (83117)
e-Mail: bappenda@ntbprov.go.id, www.bappenda.ntbprov.go.id

[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)

[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)

[@bappenda.ntb](https://twitter.com/bappenda.ntb)

www.bappenda.ntbprov.go.id

bappenda@ntbprov.go.id



GRIS

**CALL CENTER
1500186**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB, khususnya dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan situasi, kondisi, serta perkembangan keadaan yang terjadi selama periode tahun sebelumnya.

Renja Tahun 2025 memuat evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran, serta perumusan kerangka kebijakan dan pendanaan, untuk mendukung optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2025, yang disusun sesuai prinsip dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dengan mempedomani tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026. Renja Tahun 2025 yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dalam rangka menunjang pencapaian misi Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2026 dan semoga bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Mataram, Juli 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Hj. EVA DEWIYANI, S.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701210 199803 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis kinerja pelayanan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi NTB	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	52
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	52
BAB V PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023	21
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	38
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappenda Provinsi NTB.....	40
Tabel 4.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Bappenda Daerah Provinsi NTB	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yaitu perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai posisi strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai Rancangan Awal Renja sebagai arahan dalam merumuskan rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023
13. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah untuk merumuskan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sementara tujuan disusunnya Renja ini sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Berisi gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum penyusunan, sistematika dokumen OPD, serta maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan OPD yang merupakan yang disusun berdasarkan prioritas daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilakukan untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	38,65	38,65	48,69	48,34	48,32	99,24	48,32	125,02
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sistem AKIP OPD	Nilai	90,15	85,00	85,50	-	-	-	81,14	90,01
5.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	Persen	100,00	100,00	100,00	50,38	50,38	50,38	145,00	145,00
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen	6	2	2	1	2	99,14	4	63,39
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	Dokumen	33	1	1	1	1	60,00	2	4,84

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD									
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	Dokumen	33	1	1	0	1	75,91	2	5,30
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	33	1	1	0	0	48,60	1	4,46
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Dokumen	33	1	1	1	1	63,76	2	4,69
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi	Dokumen	3	1	1	0	1	101,48	2	64,63

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Kinerja SKPD	Pemerintah (LKjIP)									
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Tahunan; Profil Kinerja Bappenda	Dokumen	6	2	2	1	2	88,80	4	61,05
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	Persen	90,00	90,00	93,50	96,78	92,04	98,43		-
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Non ASN	Orang	370	370	370	370	373	100,68	371	100,34
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Dokumen	67.000	20.000	25.000	14.861	25.239	100,95	49.817	74,35
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	33	11	11	-	1	8,87	12	35,30
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	Dokumen	6	2	2	2	2	94,62	4	62,58

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan berkala	Dokumen	54	18	33	11	20	60,72	47	87,32
5.02.01.1.02.08	Penyesuaian Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Dokumen	36	12	12	1	9	78,06	13	37,05
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi	Persen	85,00	85,00	85,00	9,60	10	11,30		-
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Dokumen	66	22	22	0	10	43,34	11	17,32
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	99	33	33	5	22	66,87	32	32,69
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD	Dokumen	3	1	1	0	1	87,76	2	57,57

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	21,26	2,42	0,84	25,45	26,87	3.216,49		-
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rp.	144	48,78	48,78	12	24	49,07	68	47,50
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket Pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi	Paket	2	2,00	2,00	1	1	50,00	3	150,00
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	10	4,00	4,00	0,40	1	33,25	5	53,34
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	15,00	100,00	100,00	37,04	73,54	73,54		-
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga	Kali	220	220	220	83	161	73,35	221	100,44

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	1	1	1	1	112,40	2	66,00
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	36	12	12	5	11	90,60	22	60,12
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional	Orang	15	5	5	-	2	47,93	3	16,83
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang- Undangan Pendapatan Daerah	Paket	2	2	2	-	-	-	-	-
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	23,77	83,34	83,34		-

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jenis	675	265	265	85	259	97,84	508	75,21
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	300	300	18	17	17	94,74	34	11,37
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	10	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	370	125	125	20	95	76,25	169	45,59
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	145	145	145	70	119	82,11	217	149,93
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jenis	45	45	45	13	36	79,88	74	164,82
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	Orang/Tahun	4.500	1	1	0	1	103,17	2	0,05
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Kali Penyelenggaraan	Kali	150	150	150	3	106	70,58	117	77,96

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Konsultasi SKPD	Rapat									
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	Berkas	43.000	44	18.000	1.200	1.207	6,71	18.132	42
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda	Kunjungan	174.870	22.000	65.000	18.500	31.813	48,94	92.500	52,90
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	Persen	100,00	100,00	100,00	13,24	42,95	42,95		-
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional tersedia	Unit	2	-	-	-	-	-	2	96,55
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Buah/Set	112	-	14	14	14	97,05	27	24,42
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit/Paket	62	5	82	-	4	5,10	36	57,83
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket	20	5	6	-	-	-	6	31,49
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah gedung kantor atau bangunan	Unit	3	-	1	-	-	-	-	-

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi i s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Lainnya	lainnya									
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	17,19	59,14	59,14		-
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	Surat	36.000	10.000	11.038	1.860	5.968	54,07	15.279	42,44
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	12	4	4	1	3	83,55	6	54,00
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya	Orang	600	296	417	109	319	76,62	732	122,06
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	48,14	102,34	102,34		-
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	1	1	1	0,22	1	139,93	2	232,54

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Dinas atau Kendaraan Jabatan										
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya	Unit	189	200	38	6	126	330,96	163	86,28
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubel dan perlengkapannya yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	2	-
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	275	220	250	119	240	95,88	447	162,37
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud	Paket	25	25	22	4	14	64,01	36	142,88
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab	Unit	134	45	155	95	110	70,67	273	203,47
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Persen	38,44	35,2	48,69	39,36	39,36	80,84	46,95	122,14

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	4,79	4,05	15,51	7,39	2,95	19,00	2	50,20
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah	Dokumen	6	2	2	1	1	61,64	3	53,76
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen	60,54	63,79	51,31	54,17	-	-	56	92,86
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp	10.598,84	3.499,22	3.142,94	893,40	2.979	94,80	23,00	0,22
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	Persen	54,03	50,12	57,72	57,52	57,52	114,76	110,84	205,12
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	9,59	9,91	8,89	20,40	96,20	970,74	117	1.223,46

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisasi s.d Triwulan IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp	4.976,41	2.032,21	1.996,21	489,69	2.719,25	133,81	5.437	109,25
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah	MoU	15	5	5	0	2	47,63	6	41,92
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen	75,00	66,86	66,86	28	80	120,40	135	180,07
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi	Paket	36	12	10	3	8	64,90	13	36,85
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor	Obyek	1.918.415	1.169.088	1.126.416	247.746	915.001	78,27	1.883.928	98,20
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database	Obyek	1.936.000	1.800.000	1.800.000	304.746	1.058.113	58,78	1.882.214	97,22

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek	417.504	121.924	120.055	57.000	143.112	117,38	239.908	57,46
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen	85,00	64,20	16,07	14,39	86,65	134,98	174	204,96
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek	682.186	178.229	178.229	44.860	131.670	73,88	276.496	40,53
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek	845.618	66.680	77.180	30.226	73.866	110,78	75.744	8,96
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus	5	3	3	1	3	100	6	120,00
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan	Obyek	90.937	27.409	23.298	18.916	33.103	120,77	61.204	67,30

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode	OPD Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan Tahun yang dievaluasi (2023)	Realisas i s.d Triwula n IV	Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun dievaluasi 2023 (%)
	Daearh	kewajiban/ tunggakan PKBnya									
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp	2.279,15	917,76	961,19	892,54	1.443	157,22	2.329	102,19

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dihasilkan Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas fungsinya. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai implementasi visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, yang dalam hal ini mendukung misi ke-2 yakni Bersih Dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

Sesuai Renstra Bappenda Tahun 2019-2023, Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung sasaran Pemerintah Daerah yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Selaras dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Bappenda Provinsi NTB adalah :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif.

Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappenda Provinsi NTB beserta target dan capaian realisasinya dinyatakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target RENSTRA Tahun				Realisasi Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (%)	-	-	34,06	35,41	36,97	38,65	35,09	35,45	43,23	48,32
2.	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah (milyar)			5.049,03	5.739,96	5.796,56	6.073,97	5.174,59	5.326,93	5.042,21	5.765,18
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)			51,66	54,82	58,12	62,45	54,06	55,31	75,38	93,02
4.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)					9,08	9,59			21,37	1,54
5.	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (%)			85,00	88,50	92,50	97,50	85,27	82,15	87,79	85,22
6.	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (%)					63,64	66,33			51,04	71,91

Sumber data: LKjIP Tahun 2022, data diolah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun yang menjadi isu penting yang mempengaruhi tugas dan fungsi Bappenda Provinsi NTB belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah setyaitu implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang disusun sebagai upaya penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan Hal itu dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: **pertama** mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, **kedua** mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah dan pembiayaan utang daerah, **ketiga** mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta **keempat** harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Isu penting lainnya yaitu Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang terus dilakukan dengan elektrofikasi transaksi atau transaksi digital disemua sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sementara jenis penerimaan yang sudah melakukan transaksi digital yaitu dengan memperbanyak layanan berbasis digital seperti QRIS, EDC, serta *Payment Point Online Bank* (PPOB). Melakukan validasi data kendaraan terhadap obyek pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pajaknya dan sudah jatuh tempo pembayarannya diatas 2 (dua) tahun.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 disusun mengakomodir peraturan pemerintah pusat, sehingga terjadi penyesuaian sampai pada level program kegiatan dan sub kegiatan. Secara terinci program, kegiatan dan subkegiatan sesuai rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan Hasil Analisis Kebutuhan, sebagaimana tabel 3 di bawah.

Rancangan awal RKPD 2024 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun dalam rancangan RKPD 2025 Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB mengakomodir 3 program, 12 kegiatan, dan 67 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp119.731.326.283,- terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu indikatif Rp 112.721.842.891,-, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif Rp204.147.023,- serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu indikatif Rp6.805.336.369,-.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bappenda NTB	Nilai Sistem AKIP OPD	A	105.768.958.928	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Sistem AKIP OPD	A	131.431.678.520
01.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100	435.745.474	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100	390.098.000
01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	101.488.503	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	106.798.000
01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	41.707.929	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	43.910.000
01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	41.707.929	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	45.210.000
01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	13.635.285	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	8.160.000
01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	13.635.285	Koordinasi dan Penyusunan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	8.760.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Perubahan DPA-SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	92.832.226	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	76.700.000
01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	130.738.317	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	100.560.000
01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	3,88	78.696.396.324	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	3,88	94.220.969.949
01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	77.919.691.816	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	93.454.172.749
01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	25.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	5.100.000
01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	504.970.022	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	574.597.200

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	60.853.475	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	51.240.000
01.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	37.657.447	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	26.560.000
01.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	86.784.576	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	56.040.000
01.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	61.438.988	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	53.260.000
01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	85	374.569.289	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase BMD yang tertib administrasi	85	355.794.550
01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22	213.456.370	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22	76.902.750

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22	124.843.060	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22	66.536.800
01.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	36.269.859	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	212.355.000
01.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,71	222.145.270	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	0,71	222.145.270
01.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	91.933.784	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	81.933.784
01.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	55.027.486	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	50.027.486
01.04.03	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	15.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1	15.000.000
01.04.04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	60.184.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	75.184.000
01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	0,05	399.852.101	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	0,05	399.852.101

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220	108.008.880	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	220	108.008.880
01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappenda NTB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	360	36.093.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappenda NTB	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	360	36.093.400
01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	52.134.915	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	52.134.915
01.05.04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	60.155.670	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	60.155.670
01.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	30.526.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bappenda NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	30.526.900
01.05.06	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	80.528.484	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	80.528.484
01.05.07	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	32.403.852	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	32.403.852
01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase penyelesaian Administrasi Umum	100	5.474.441.762	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappenda NTB	Persentase penyelesaian Administrasi Umum	100	5.474.441.762

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OPD					OPD		
01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	180.467.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	180.467.000
01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115	40.103.770	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	115	40.103.770
01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappenda NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	5.000.000
01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.130.613.728	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.130.613.728
01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappenda NTB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	883.037.073	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappenda NTB	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120	883.037.073
01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	89.832.463	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	89.832.463
01.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	694.060.070	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	694.060.070
01.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.901.801.374	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1.901.801.374

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	39.526.284	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	39.526.284
01.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	510.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	510.000.000
01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100	2.454.945.385	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100	10.024.459.200
01.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	622.560.000
01.07.02	Pengadaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	248.643.425	Pengadaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	694.665.200
01.07.03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	589.525.540	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	785.320.000
01.07.04	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5	88.228.312	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5	140.240.000
01.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	937.925.448	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	7.540.360.000
01.07.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7	240.622.660	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Bappenda NTB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	7	241.314.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lainnya		Disediakan			Lainnya		Disediakan		
01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100	14.447.315.668	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100	16.940.814.000
01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	87.233.738	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11	113.565.000
01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.043.563.963	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	3.639.553.000
01.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	11.316.517.967	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	13.187.696.000
01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100	3.263.547.655	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappenda NTB	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100	3.761.093.000
01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	25.000.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	1.923.904.292	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappenda NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	192	2.289.250.000
01.09.03	Pemeliharaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	40.103.780	Pemeliharaan Mebel	Bappenda NTB	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	15.060.000
01.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490	528.567.797	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	490	487.570.000
01.09.05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	88.228.312	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Bappenda NTB	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	75.060.000
01.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	645.712.341	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	842.945.000
01.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	12.031.133	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	26.208.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bappenda NTB	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,87	208.229.963	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bappenda NTB	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	55,87	187.820.000
02.01	Koordinasi dan Penyusunan	Bappenda NTB	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-5,47	113.229.963	Koordinasi dan Penyusunan	Bappenda NTB	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-5,47	99.360.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rencana Anggaran Daerah					Rencana Anggaran Daerah				
02.01.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	113.229.963	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	89.360.000
02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bappenda NTB	Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer	0,11	95.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bappenda NTB	Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer	0,11	88.460.000
02.02.01	Koordinasi. Fasilitas. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Fasilitas. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	95.000.000	Koordinasi. Fasilitas. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Fasilitas. Asistensi. Sinkronisasi. Supervisi. Monitoring. dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2	68.460.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bappenda NTB	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,18	5.941.443.096	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bappenda NTB	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	47,18	5.941.443.096
03.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda NTB	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,2	5.941.443.096	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda NTB	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	-11,2	9.141.483.000
03.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	261.663.712	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	417.300.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	208.242.765	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	274.170.000
03.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	169.853.826	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	179.560.000
03.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	671.028.669	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	1.463.080.000
03.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	518.282.113	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	810.950.000
03.01.06	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	111.293.679	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	216.960.000
03.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.101.062.977	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	1.885.260.000
03.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	98.156.044	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11	36.308.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	22.258.728	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4	8.010.000
03.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	484.686.273	Penagihan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	678.105.000
03.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	24.731.919	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	14.810.000
03.01.12	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40	2.014.620.672	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	40	2.845.620.000
03.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	205.561.719	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	218.460.000
03.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	50.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bappenda NTB	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	92.890.000

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Daerah Provinsi NTB

Dalam renja perangkat daerah tahun 2025 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada tahun 2025 tidak melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari usulan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Adanya UU 1 Tahun 2022 diharapkan meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintah Pusat, Provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimalkan ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar. Selain itu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi split langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Perangkat Daerah Bappenda Provinsi NTB dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target Indikator Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah	1.1 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (<i>Milyar rupiah</i>)	2.249,47
			1.1.2 Persentase Peningkatan PAD (Persen)	-11,68
		1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	95,00
			1.2.2 Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Objek)	11.015

Sumber data: Dokumen Renstra Bappenda Provinsi NTB2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB pada tahun 2025 merumuskan dan merencanakan Program dan Kegiatan yang diakomodir dalam 3 Program 12 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk tahun rencana 2024 maupun prakiraan maju tahun 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 356-61 Tahun 2024 tentang Penetapan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Pilot Project Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk mewakili Provinsi NTB dalam kegiatan tersebut. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, Bappenda dari tahun ini sampai kedepannya berencana akan menyiapkan infrastruktur layanan melalui penyeragaman infrastruktur layanan karena sampai dengan saat ini kondisi infrastruktur pendukung berupa perangkat keras pendukung kesamsatan serta internet sebagai jalur komunikasi data serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti gedung yang belum memenuhi standar layanan serta sarana dan sarana pendukung lainnya, dan hal ini didukung dengan biaya yang cukup.

Adapaun Program Kegiatan yang akan dilakukan Bappenda Provinsi selain terus melakukan Optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah juga meningkatkan kualitas layanan dengan mengalokasikan biaya rehabilitasi sarana prasarana yang sudah tidak layak guna.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran		90 Persen	104.811.948.240		90%	108.781.010.640
5.2.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja		100 Persen	435.760.000		100%	435.760.000
5.2.1.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	2 Dokumen	101.490.000		2 Dokumen	101.490.000
5.2.1.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Mataram	1 Dokumen	41.710.000		1 Dokumen	41.710.000
5.2.1.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	1 Dokumen	41.710.000		1 Dokumen	41.710.000
5.2.1.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Mataram	1 Dokumen	13.640.000		1 Dokumen	13.640.000
5.2.1.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Mataram	1 Dokumen	13.640.000		1 Dokumen	13.640.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DPA- SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD						
5.2.1.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mataram	2 Laporan	92.830.000		2 Laporan	92.830.000
5.2.1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	2 Laporan	130.740.000		2 Laporan	130.740.000
5.2.1.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD		93,5 Persen	78.430.033.630		93,5 Persen	80.430.033.630
5.2.1.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	360 Orang/ Bulan	77.663.513.630	Pagu Anggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai dan target Pajak Daerah TA berikutnya	360 Orang/ Bulan	79.663.513.630
5.2.1.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	1 Dokumen	25.000.000		1 Dokumen	25.000.000
5.2.1.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Se-NTB	12 Dokumen	494.934.600		4 Dokumen	494.934.600

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
5.2.1.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	1 Laporan	60.850.000		1 Laporan	60.850.000
5.2.1.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Mataram	2 Dokumen	37.660.000		2 Dokumen	37.660.000
5.2.1.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Mataram	18 Laporan	86.780.000		18 Laporan	86.780.000
5.2.1.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Mataram	12 Dokumen	61.295.400		12 Dokumen	61.295.400
5.2.1.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi		85 Persen	414.327.600		85 Persen	414.327.600
5.2.1.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Se-NTB	22 Dokumen	171.062.200		22 Dokumen	171.062.200
5.2.1.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Se-NTB	22 Laporan	92.295.400		22 Laporan	92.295.400

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD						
5.2.1.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Se-NTB	1 Laporan	150.970.000		1 Laporan	150.970.000
5.2.1.1.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah		0,71 Persen	207.140.000		0,71 Persen	157.140.000
5.2.1.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Se-NTB	1 Dokumen	91.930.000		1 Dokumen	91.930.000
5.2.1.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Mataram	1 Dokumen	55.030.000		1 Dokumen	5.030.000
5.2.1.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Se-NTB	4 Laporan	60.180.000		4 Laporan	60.180.000
5.2.1.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya		17 Persen	396.247.800		17 Persen	396.247.800
5.2.1.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Se-NTB	240 220 Unit	104.407.800		240 220 Unit	104.407.800
5.2.1.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Mataram	370 buah	36.090.000		370 buah	36.090.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	11 Dokumen	52.130.000		11 Dokumen	52.130.000
5.2.1.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	11 Dokumen	60.160.000		11 Dokumen	60.160.000
5.2.1.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah/ Dalam Daerah	15 Orang	30.530.000		15 Orang	30.530.000
5.2.1.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	100 Orang	80.530.000		100 Orang	80.530.000
5.2.1.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah/ Dalam Daerah	96 Orang	32.400.000		96 Orang	32.400.000
5.2.1.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD		100 Persen	4.697.206.010		100 Persen	5.261.148.410
5.2.1.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Se-NTB	25 Paket	179.193.500		25 Paket	179.193.500
5.2.1.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mataram	2 Paket	11.200.000		2 Paket	11.200.000
5.2.1.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Mataram	1 Paket	5.000.000		1 Paket	5.000.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Disediakan						
5.2.1.1.07.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Se-NTB	125 Paket	1.128.054.900		125 Paket	1.128.054.900
5.2.1.1.08.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Se-NTB	140 Paket	882.152.810		140 Paket	882.152.810
5.2.1.1.09.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Se-NTB	5 Dokumen	100.782.000		5 Dokumen	100.782.000
5.2.1.1.10.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Se-NTB	5 Laporan	786.765.200		5 Laporan	786.765.200
5.2.1.1.11.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Se-NTB	12 Laporan	1.580.000.000		12 Laporan	1.880.000.000
5.2.1.1.12.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Mataram	2 Dokumen	38.000.000		2 Dokumen	38.000.000
5.2.1.1.13.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Mataram	12 Dokumen	250.000.000		12 Dokumen	250.000.000
5.2.1.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang		100 Persen	1.313.513.100		100 Persen	2.313.633.100

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Mataram	1 Unit	250.000.000		3 Unit	900.000.000
5.2.1.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mataram	23 Paket	249.200.000		23 Paket	249.200.000
5.2.1.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Se-NTB	52 Unit	473.803.100		52 Unit	473.803.100
5.2.1.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Mataram	4 Unit	88.230.000		4 Unit	88.230.000
5.2.1.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Se-NTB	1 Unit	126.200.000	Pembangun Kantor Samsat Praya jika gagal, akan dialihkan ke tahun berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah	1 Unit	376.200.000
5.2.1.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Se-NTB	10 Unit	126.200.000		10 Unit	226.200.000
5.2.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD		100 Persen	15.619.327.800		100 Persen	15.619.327.800

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Se-NTB	12 Laporan	86.376.800		12 Laporan	86.376.800
5.2.1.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Se-NTB	12 Laporan	3.038.602.600		12 Laporan	3.038.602.600
5.2.1.1.08.0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Se-NTB	12 Laporan	12.494.348.400		12 Laporan	12.494.348.400
5.2.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja		100 Persen	3.298.392.300		100 Persen	3.753.392.300
5.2.1.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Se-NTB	1 Unit	25.000.000		1 Unit	25.000.000
5.2.1.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Se-NTB	35 Unit	1.962.564.300		35 Unit	1.962.564.300
5.2.1.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Se-NTB	125 Unit	25.000.000		125 Unit	25.000.000
5.2.1.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Se-NTB	120 Unit	519.823.600		120 Unit	519.823.600

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Mataram	10 Unit	80.000.000		10 Unit	80.000.000
5.2.1.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Se-NTB	12 Unit	611.004.400		12 Unit	1.061.004.400
5.2.1.1,09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Se-NTB	11 Unit	80.000.000		11 Unit	80.000.000
5.2.2..	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Proporsi Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah		52,82 Persen	205.000.000		52,82 Persen	205.000.000
5.2.2.1,01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah		-5,47 Persen	110.000.000		-5,47 Persen	110.000.000
5.2.2.1,01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Mataram	2 Dokumen	110.000.000		2 Dokumen	110.000.000
5.2.2.1,03.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Transfer		0,11 Persen	95.000.000		0,11 Persen	95.000.000
5.2.2.1,03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Luar Daerah/ Dalam Daerah	4 Dokumen	95.000.000		4 Dokumen	95.000.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Diluar DAK		47,19 Persen	5.971.455.200		47,19 Persen	7.369.355.200
5.2.4.1.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		-11,72 Persen	5.971.455.200		-11,72 Persen	7.369.355.200
5.2.4.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Mataram	12 Dokumen	305.000.000		12 Dokumen	305.000.000
5.2.4.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Mataram	12 Laporan	200.000.000		12 Laporan	200.000.000
5.2.4.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Se-NTB	52 Laporan	213.918.500		52 Laporan	213.918.500
5.2.4.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Se-NTB	40 Sarana dan Prasarana	600.000.000		40 Sarana dan Prasarana	900.000.000
5.2.4.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Se-NTB	52 Laporan	676.145.500		52 Laporan	676.145.500

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Se-NTB	12 Laporan	100.000.000		12 Laporan	100.000.000
5.2.4.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Se-NTB	1 Dokumen Ketetapan	1.086.250.700		1 Dokumen Ketetapan	1.236.250.700
5.2.4.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindak lanjuti.	Se-NTB	12 Laporan	96.200.000		12 Laporan	96.200.000
5.2.4.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Se-NTB	4 Dokumen	22.000.000		4 Dokumen	22.000.000
5.2.4.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Se-NTB	2 Dokumen	470.840.500		2 Dokumen	470.840.500
5.2.4.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Se-NTB	2 Dokumen	24.000.000		2 Dokumen	24.000.000
5.2.4.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Se-NTB	4 Laporan	1.922.100.000		4 Laporan	2.850.000.000
5.2.4.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Se-NTB	4 Laporan	205.000.000		4 Laporan	205.000.000

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4.1.01.0014	ElektroniWikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan ElektroniWikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Se-NTB	2 Laporan	50.000.000		2 Laporan	70.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB pada Tahun 2025 lebih mengacu kepada memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan fiskal daerah guna memenuhi pendanaan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Perangkat Daerah selaku koordinator pengelola pendapatan daerah, Bappenda Provinsi NTB juga memiliki tugas sebagai Perangkat Daerah teknis yang melakukan pemungutan langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan serta pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2022 yaitu pemungutan atas Pajak Kendaraan Alat Berat.

Untuk mendukung upaya tersebut maka dibutuhkan sumber daya berupa pendanaan terkait dengan biaya operasional pemungutan pajak daerah serta peremajaan infrastruktur peralatan Kesamsatan, berupa peralatan teknis dan jaringan internet. Disamping itu perlu dilakukan adanya dukungan infrastruktur bangunan gedung berupa ruang pelayanan wajib pajak dan ruang kerja petugas yang nyaman. Disamping itu akan direncanakan pengadaan beberapa unit mobil operasional seperti mobil samsat keliling dalam memaksimalkan pelayanan publik, kendaraan truk dalam rangka operasi sadar pajak, dan beberapa unit kendaraan operasional pengganti kendaraan operasional yang sudah tidak laik jalan,

Tabel 4.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran			90 Persen	104.811.948.240	
5.02.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja			100 Persen	435.760.000	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappenda dan UPTB	Mataram	2 Dokumen	101.490.000	DAU
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	41.710.000	DAU
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	41.710.000	DAU
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	13.640.000	DAU
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappenda dan UPTB	Mataram	1 Dokumen	13.640.000	DAU
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Bappenda dan UPTB	Mataram	2 Laporan	92.830.000	DAU

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Kinerja SKPD					
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	130.740.000	DAU
5.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD			93,50 Persen	78.430.033.630	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	Se-NTB	360 Orang/Bulan	77.663.513.630	DAU
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN	Se-NTB	1 Dokumen	25.000.000	DAU
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	4 Dokumen	494.934.600	DAU
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Laporan	60.850.000	DAU
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Dokumen	37.660.000	DAU
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	18 Laporan	86.780.000	DAU
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Dokumen	61.295.400	DAU
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang tertib administrasi			85 Persen	414.327.600	

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	22 Dokumen	171.062.200	DAU
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	22 Laporan	92.295.400	DAU
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Laporan	150.970.000	DAU
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah bukan Pajak			35 Persen	207.140.000	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	1 Dokumen	91.930.000	PAD
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	1 Dokumen	55.030.000	PAD
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	4 Laporan	60.180.000	PAD
5.02.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya			1,50 Persen	396.247.800	
5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bappenda & UPTB	Se-NTB	220 Unit	104.407.800	DAU
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	370 Paket	36.090.000	DAU
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappenda & UPTB	Se-NTB	11 Dokumen	52.130.000	DAU
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Monitoring,	Bappenda &	Se-NTB	11 Dokumen	60.160.000	DAU

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penilaian Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	UPTB				
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappenda & UPTB	Mataram	15 Orang	30.530.000	DAU
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda & UPTB	Mataram	100 Orang	80.530.000	DAU
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bappenda & UPTB	Mataram	96 Orang	32.400.000	DAU
5.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Administrasi Umum OPD			100 Persen	4.712.146.010	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	25 Paket	179.193.500	DAU
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Paket	11.080.000	DAU
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Paket	962.568.600	DAU
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	125 Paket	270.463.100	DAU
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	20 Paket	852.958.010	DAU
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	5 Dokumen	605.765.200	DAU
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	1.191.000.000	DAU
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	351.117.600	DAU

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	SKPD	SKPD					
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappenda	Mataram	2 Dokumen	38.000.000	DAU
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bappenda	Mataram	12 Dokumen	250.000.000	DAU
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang			100 Persen	1.313.633.100	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	UPTB	Mataram	1 Unit	250.000.000	PAD
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	UPTB	Se-NTB	20 Paket	249.200.000	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	25 Unit	473.803.100	PAD
5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	4 Unit	88.230.000	PAD
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Unit	126.200.000	PAD
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	10 Unit	126.200.000	PAD
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD			100 Persen	15.619.327.800	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	86.376.800	DAU
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	3.038.602.600	DAU

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	12.494.348.400	PAD
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD			100 Persen	3.283.332.300	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Unit	25.000.000	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappenda & UPTB	Se-NTB	35 Unit	1.962.504.300	
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bappenda	Mataram	20 Unit	25.000.000	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappenda & UPTB	Se-NTB	20 Unit	519.823.600	
5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			10 Unit	80.000.000	PAD
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Unit	611.004.400	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappenda & UPTB	Se-NTB	1 Unit	60.000.000	
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah			55,94 Persen	205.000.000	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan	Pertumbuhan Pendapatan Daerah			-5,47 Persen	110.000.000	

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rencana Anggaran Daerah						
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	OPD TAPD	Se-NTB	2 Dokumen	110.000.000	PAD
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-			-	95.000.000	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	K/L Pemkab BPKAD OPD	Jakarta Se-NTB	4 Dokumen	95.000.000	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK			47,19 Persen	5.971.455.200	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah			-11,72 Persen	5.971.455.200	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Dokumen	305.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	12 Laporan	200.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Masyarakat	Se-NTB	12 Laporan	213.918.500	PAD
5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	40 Sarana dan Prasarana	600.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak/Subjek Pajak	Se-NTB	12 Laporan	676.145.500	PAD

Terwujudnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Indikator	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Mataram	12 Laporan	100.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak/Subjek Pajak	Se-NTB	1 Dokumen Ketetapan	1.086.250.700	PAD
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Wajib Pajak/Subjek Pajak	Se-NTB	2 Laporan	96.200.000	PAD
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Mataram	4 Dokumen	22.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Bappenda & UPTB	Se-NTB	2 Dokumen	470.840.500	PAD
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Bappenda & UPTB	Mataram	2 Dokumen	24.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bappenda & UPTB	Se-NTB	4 Laporan	1.922.100.000	PAD
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	4 Laporan	205.000.000	PAD
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	OPD Pendapatan	Se-NTB	2 Laporan	50.000.000	PAD

BAB V

P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan tahun 2025 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renja Tahun 2025 ini merupakan Renja tahun kedua yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2026

merupakan Rencana Pembangunan Daerah Transisi yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur NTB. serta berdasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan dapat terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas yang berkelanjutan serta terciptanya komunikasi antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2025 diharapkan bermanfaat bagi seluruh komponen beserta para pihak yang melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta dokumen ini juga menjadi acuan dalam proses penyusunan RKA maupun penetapan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.